

Analisis Kinerja Belanja Daerah dan Efektivitas Pajak Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Fifi Aleyda Yahya¹, Marsella Dwi Jayanti², Yesi Ditaviani³, Nandita Ardaningrum⁴, Isyfa Qurrata Aini⁵, Ulfatu Rohmah⁶, Mega Tunjung Hapsari⁷

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

fifialeйда88@gmail.com¹, marselladj14@gmail.com², yesiditvn@gmail.com³, ditaningrum077@gmail.com⁴,
isyfaaini22@gmail.com⁵, ulfatu.rhm26@gmail.com⁶, hapsarimega11@gmail.com⁷

Diserahkan tanggal 22 Juli 2024 | Diterima tanggal 23 September 2024 | Diterbitkan tanggal 30 September 2024

Abstract:

This research was conducted to assess the performance of regional spending and the effectiveness of taxes in Blitar Regency during 2019-2023. The ratio analysis used is the expenditure growth ratio, operating expenditure ratio, capital expenditure ratio and tax effectiveness ratio. The data collection method uses quantitative descriptive. The research uses secondary data by looking for data from BPS sources and the Blitar Regency Ministry of Finance. The research discussion shows that the results of the Blitar Regency expenditure growth ratio analysis are not good with the average expenditure growth being greater than income growth, namely $3.37% > 1.19%$. Operating expenditure ratio with an average percentage of 56.42% with good performance criteria. The capital expenditure ratio obtained an average percentage of 16.08% with good expenditure performance criteria. Meanwhile, the tax effectiveness ratio obtained an average percentage of 118.62%, which means that tax performance is very effective.

Keywords: Expenditure Performance, Tax Effectiveness, Blitar Regency.

Abstrak :

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja belanja daerah dan efektivitas pajak Kabupaten Blitar selama tahun 2019-2023. Analisis rasio yang digunakan yaitu rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio efektivitas pajak. Metode pengumpulan data menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan data sekunder dengan mencari data dari sumber BPS dan Kemenkeu Kabupaten Blitar. Pembahasan penelitian menunjukkan hasil analisis rasio pertumbuhan belanja Kabupaten Blitar kurang baik dengan pertumbuhan rata-rata belanja lebih besar dari pertumbuhan pendapatan yakni $3,37% > 1,19%$. Rasio belanja operasi dengan persentase rata-rata 56,42% dengan kriteria kinerja baik. Rasio belanja modal diperoleh persentase rata-rata 16,08% dengan kriteria kinerja belanja baik. Sementara rasio efektivitas pajak diperoleh persentase rata-rata 118,62% yang artinya kinerja pajak sangat efektif.

Kata Kunci: Kinerja Belanja, Efektivitas Pajak, Kabupaten Blitar.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan dasar hukum yang menyampaikan kewenangan luas kepada daerah guna mengatur wilayahnya sendiri. Daerah diberikan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai prinsip desentralisasi. Daerah juga diberi kebebasan atas pengelolaan anggaran yang disusunnya sendiri, namun harus bertanggung jawab atas penggunaannya (Nasution, 2019). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja pengelolaan keuangan. Otonomi daerah mewajibkan Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan secara efisien dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya.

Kondisi keuangan daerah merujuk pada tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mencapai target-target keuangan yang telah ditetapkan dilihat dari kemampuan mengelola uangnya sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintahan pusat. Hal ini mencakup kemampuan dalam mendapatkan pendapatan daerah, membuat anggaran belanja daerah, dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Kebebasan untuk menggunakan sumber daya daerah yang digunakan untuk kebutuhan warga setempat sesuai dengan koridor hukum (Rakadewa, 2022). Semakin baik kinerja keuangannya, semakin besar otonomi daerah tersebut dalam menentukan kebijakan anggaran dan pembangunan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, pemerintah wajib untuk menerapkan akuntansi pendapatan dan beban yang sesuai dalam menyusun rincian keuangannya berdasarkan standar yang ditentukan pada APBN/APBD. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Metode ini mengharuskan pengakuan pemasukan dan pengeluaran pada saat transaksi terjadi, tidak hanya ketika kas masuk maupun keluar saja. Manajemen keuangan daerah memainkan peran penting pada peningkatan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan laporan keuangan yang lebih tepat dan terbuka, pemerintah daerah mampu mengambil keputusan lebih baik dalam mengalokasikan anggaran dan peningkatan pelayanan publik (Hendra Agus P, 2016).

Laporan keuangan tahunan Kabupaten Blitar adalah tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan kekayaan alam sebagai bukti pertanggungjawaban dari performansi pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Laporan ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Blitar di periode kedepannya. Potensi sumber daya alam, budaya, dan sejarah yang melimpah di Kabupaten Blitar jika dikelola dengan efektif dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karenanya, potensi tersebut dapat secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan daerah (Yeni amalia, 2024).

Untuk melihat kinerja fiskal daerah secara komprehensif, beberapa peneliti sebelumnya telah menggunakan berbagai rasio keuangan. Misalnya (Tumija dan Ghina Sinta, 2021) menggunakan 7 rasio keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Cilacap periode 2017-2020 yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, Debt Service Coverage Ratio, rasio pertumbuhan pendapatan transfer, dan rasio pertumbuhan belanja daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Sementara (Zaky Hidayah dan Banu Witono, 2021) menggunakan 7 rasio yang berbeda guna menilai kesehatan keuangan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2015-2019 yaitu rasio desentralisasi, rasio independensi, rasio rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio provabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio desentralisasi dan independensi pemerintah daerah masih rendah, dengan masing-masing berada di 17% dan 23%. Meskipun rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, rasio belanja modal mencapai 20%, yang menunjukkan pemenuhan anggaran yang baik. Rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, tetapi rasio profitabilitas cenderung fluktuatif, mengindikasikan

ketidakstabilan dalam kinerja keuangan. Dari penelitian-penelitian sebelumnya ini dapat menjadi rujukan dalam memilih dan menggunakan rasio keuangan yang tepat untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Blitar khususnya bagian perbelanjaan daerah.

Perbedaan penelitian ini terletak pada menggunakan data yang lebih terkini, yakni periode 2019-2023. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan menyediakan gambaran terkini terkait kondisi keuangan Kabupaten Blitar. Untuk menilai kinerja keuangannya, penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan yang berbeda yaitu rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efektivitas pajak untuk menilai kinerja belanja dan efektivitas pajak Kabupaten Blitar selama periode 2019-2023. Menurut Pramono (2014), rasio-rasio ini penting untuk menilai kemandirian dan efektivitas keuangan daerah, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan rasio ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Blitar secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu instrumen penting untuk menguji performa finansial pemerintah daerah yakni melalui uji coba menggunakan rasio keuangan. Riset ini ditujukan untuk menguji kinerja keuangan Kabupaten Blitar selama periode 2019-2023 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah disebutkan. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio pertumbuhan belanja Kabupaten Blitar kurang baik dengan pertumbuhan rata-rata belanja lebih besar dari pertumbuhan pendapatan yakni $3,37\% > 1,19\%$. Rasio belanja operasi dengan persentase rata-rata $56,42\%$ dengan kriteria kinerja baik. Rasio belanja modal diperoleh persentase rata-rata $16,08\%$ dengan kriteria kinerja belanja baik. Sementara rasio efektivitas pajak diperoleh persentase rata-rata $118,62\%$ yang artinya kinerja pajak sangat efektif. Di samping itu, diharapkan penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber referensi untuk pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengambil keputusan terkait strategi keuangan di masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan berasal dari data sekunder. Dalam penelitian ini, metode analisis data berupa deskriptif. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar serta website Kemenkeu yang berisi portal data APBD. Data utama yang dipergunakan adalah rekapitulasi anggaran Kabupaten Blitar tahun 2019-2023. Laporan-laporan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Laporan Belanja Daerah dan Efektivitas Pajak.

PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja digunakan untuk menilai prestasi suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu. Pertumbuhan belanja dihitung dengan mengurangkan nilai belanja pada periode akhir dari mulai belanja pada periode saat ini, kemudian hasilnya dibagi dengan nilai belanja periode akhir. Rumus perhitungan:

$$PB \text{ Tahun } t = (\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja 1 Tahun sebelumnya}) / (\text{Belanja 1 Tahun sebelumnya}) \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio pertumbuhan belanja:

Apabila persentase pertumbuhan belanja lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan maka kinerja dinyatakan baik. Apabila presentase pertumbuhan belanja lebih besar dari pertumbuhan pendapatan maka kinerja dinyatakan kurang baik. (Natalia Dan Mega, 2023), sebagaimana tabel 1 dibawah:

Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2019	2.462.287.179.043,71	2,03%	11,44%	Kurang Baik
2020	2.282.907.546.842,85	-6,04%	-7,28%	Kurang Baik
2021	2.294.172.722.399,62	9,38%	0,49%	Baik
2022	2.468.613.988.476,88	-0,91%	7,60%	Kurang Baik
2023	2.582.427.132.310,60	1,52%	4,61%	Kurang Baik
Rata-Rata	2.418.081.713.814,73	1,19%	3,37%	Kurang Baik

Sumber: BPS Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Diketahui total belanja Kabupaten Blitar pada tahun 2018 yang tidak dituliskan pada tabel di atas dan sebagai acuan perhitungan adalah 2.209.343.992.301,77 . Perhitungan data di atas merupakan rasio pertumbuhan belanja dari Kab. Blitar dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat fluktuasi pada pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2021 kinerja pertumbuhan belanja dianggap baik dengan presentasi $0,49\% \leq 9,38\%$. Selain itu, sempat terjadi penurunan total belanja pada tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja bernilai negatif. Secara keseluruhan, kinerja belanja Kab. Blitar dinilai kurang baik dengan pertumbuhan rata-rata belanja lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan yakni $3,37\% > 1,19\%$. Pertumbuhan belanja cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan, namun secara garis besar berada di bawah 10%. Ini mengindikasikan bahwa Kab. Blitar perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja belanja daerah.

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja (BOTB)

Belanja operasional yaitu merujuk pada pengeluaran aktivitas sehari-hari daerah serta memberikan keuntungan dalam waktu yang pendek (Sringningsih dan Sayud, 2021). Cara mencari rasio belanja operasional ialah membagi antara realisasi belanja operasi dengan target belanja daerah. Rumus perhitungan:

$$\text{Rasio BOTB} = (\text{Realisasi Belanja Operasional}) / (\text{Target Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Perbandingan 60% Dan 90% Belanja Operasional mempengaruhi total Belanja Daerah (Natalia Dan Mega, 2023):

- Besaran persentase botb $< 90\%$, = kinerja belanja baik
- Besaran persentase botb $> 90\%$, = kinerja belanja operasi kurang baik

Tabel 2. Rasio BOTB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Oprasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	BOTB (%)	Kinerja
2019	1 336 792 062 459,2	2 462 287 179 043,71	54,29 %	Baik
2020	1.450.126.897.497,77	2.282.907.546.842,85	63,52 %	Baik
2021	1.280.667.176.169,00	2.294.172.722.399,62	55,82 %	Baik
2022	1.353.976.485.998,80	2.468.613.988.476,88	54,84 %	Baik
2023	1.400.403.996.247,50	2.582.427.132.310,60	54,22 %	Baik
Rata-rata	1.364.393.323.674,454	2.418.081.713.814,732	56,42 %	Baik

Sumber: BPS Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Dari tabel 2 di atas dapat diartikan bahwa rasio biaya operasional berada pada tingkat yang baik yaitu di bawah 90%. Tetapi pada tahun 2020, BOTB meningkat dari 54,29% pada 2019 berubah menjadi 63,52% tahun 2020. Setelah peningkatan BOTB pada tahun 2020, BOTB mencatat penurunan pada tahun 2021 hingga 2023, yang menunjukkan seberapa baik kinerja BOTB di Kab. blitar ini. Dapat disimpulkan bahwa rasio belanja operasional terhadap modal belanja Kab. Blitar secara konsisten mencapai hasil yang baik pada 2019 hingga 2023. Dengan perhitungan tabel rasio BOTB diperoleh rata-rata 56,42% yang artinya bahwa 2019 hingga 2023 angka tersebut termasuk dalam batas yang wajar dalam pengalokasi yang kurang dari 90%. (Natalia Dan Mega, 2023)

Analisis Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (BMTB)

Belanja modal ialah salah satu jenis belanja yang digunakan untuk membeli ativa tetap maupun aktiva lain serta merujuk pada pengeluaran guna membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberikan kemudahan dalam beberapa periode akuntansi. Cara mencari rasio BMTB yaitu membagi antara jumlah belanja modal yang telah tercapai dengan target belanja daerah. Perhitungan:

$$\text{Rasio BMTB} = (\text{Realisasi Belanja Modal}) / (\text{Target Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Penilaian rasio BMTB:

- Apabila presentase yang dihasilkan > 5%, = kinerja belanja baik
- Apabila presentase yang dihasilkan < 5%, = kinerja belanja tidak baik (Natalia Dan Mega, 2023)

Tabel 3. Rasio BMTB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2019	518 398 600 299,86	2 462 287 179 043,71	21,05 %	Baik
2020	271.999.153.804,09	2.282.907.546.842,85	11,91 %	Baik
2021	359.930.998.439,11	2.294.172.722.399,62	15,68 %	Baik
2022	385.119.247.079,61	2.468.613.988.476,88	15,60 %	Baik
2023	409.389.083.418,33	2.582.427.132.310,60	15,85 %	Baik
Rata-rata	388.967.416.608,20	2.418.081.713.814,732	16,08 %	Baik

Sumber: BPS Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 3 perhitungan rasio BMTB Kabupaten Blitar selama 5 tahun memiliki tingkat belanja modal berada pada tingkat yang baik. Tahun 2019 perhitungan menunjukkan persentase 21,05% dimana memiliki kinerja belanja baik. Pada tahun 2020 diperoleh dengan persentase 11,91% artinya masih memiliki kinerja belanja baik. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan secara berkala dengan persentase masing masing 15,68%, 15,60% dan 15,85% masih dikatakan memiliki kinerja belanja baik. Selama periode 2019-2023 perhitungan rata-rata rasio BMTB menunjukkan persentase 16,08% yang lebih besar dari 5%. Yang artinya secara keseluruhan kinerja belanja Kabupaten Blitar kinerja belanjanya baik.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak

Rasio efektivitas ini mengukur kenggulan wilayah dalam menghimpun pajak berdasarkan sasaran yang telah ditentukan serta seberapa baik pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan anggaran berdasarkan potensi asli daerah. Yang artinya, semakin tinggi rasio efektivitas daerah, semakin optimal pula kinerja pemerintah daerah. Rumus perhitungan:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = (\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}) / (\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}) \times 100\%$$

Penilaian Efektivitas Pajak (Mega, 2022):

- Persentase >100%, berarti kinerja sangat efektif
- Persentase 100%, berarti kinerja efektif
- Persentase 90%-99%, berarti kinerja cukup efektif
- Persentase 75%-89%, berarti kinerja kurang efektif
- Persentase <75%, berarti kinerja tidak efektif

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pajak Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas (%)	Kinerja
2019	237.310.000.000	285.740.000.000	120,40 %	Sangat Efektif
2020	263.660.000.000	302.540.000.000	114,74 %	Sangat Efektif
2021	284.050.000.000	407.530.000.000	143,47 %	Sangat Efektif
2022	336.540.000.000	422.740.000.000	125,61 %	Sangat Efektif
2023	382.110.000.000	339.690.000.000	88,89 %	Kurang Efektif
Rata-rata	300.734.000.000	351.630.000.000	118,62 %	Sangat Efektif

Sumber: Kemenkeu data APBD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 4 perhitungan rasio efektivitas pajak Kabupaten Blitar selama 5 tahun mulai dari 2019-2023 memiliki kinerja sangat efektif. Tahun 2019 perhitungan menunjukkan persentase 120,40% di mana kinerja pajak sangat efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan persentase sebesar 114,74% tetapi masih dikatakan kinerja pajak sangat efektif. Pada tahun 2021 menunjukkan persentase sebesar 143,47% dan menurun di tahun 2022 menjadi 125,61%. Tahun 2023 mengalami penurunan sangat signifikan dengan persentase 88,89% sehingga menunjukkan kinerja kurang efektif. Yang artinya secara keseluruhan kinerja efektivitas pajak kabupaten Blitar kinerjanya sangat baik atau sangat efektif. (Natalia Dan Mega, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui perhitungan rata-rata rasio belanja daerah dan efektivitas pajak Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 menemukan: Rosio pertumbuhan belanja secara keseluruhan dinilai kurang baik dengan pertumbuhan rata-rata belanja lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dengan presentase $3,37\% > 1,9\%$, rosio belanja operasional menunjukkan persentase rata-rata $56,42\%$ yang dimana rasio kurang dari 90% sehingga dianggap kinerja baik, lalu persentase rata-rata analisis rasio belanja modal pada tahun 2019-2023 diperoleh presentase $16,08\%$ yang artinya rasio belanja modal Kabupaten Blitar baik, terakhir dapat dilihat presentase rata-rata analisis rasio efektivitas pajak diperoleh presentase $118,62\%$ yang artinya secara keseluruhan kinerja efektivitas pajak sangat efektif karena menunjukkan lebih dari 100% . Dengan demikian kinerja pajak Kabupaten Blitar sudah optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Yeni. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023*. Tulungagung: Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Hapsari, Mega Tunjung. (2022). Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pjaka Seta Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 9(2): 304—320.
- Hidayah, Zaky dan Banu Witono. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Journal Statistics Count*. 2 (1): 217—228.
- Marlianita, Yulistiani. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negri Bandung*, 1(01) , 25—35.
- Nasution, A. I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8 (01), 71—,81.
- Prastya, Hendra Agus. (2016). Financial Performance Analysis Based on Government Financial Statements (Study on The Government of Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 4 (2).
- Rakadewa, V. A. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Selvi, Natalia Mega dan Mega Tunjung Hapsari. 2023. Kinerja Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Vol. 4 (No.1): 205—114.
- Sriningsih, Siti, Bq. Ismiwati, Muhamad Sayut. 2021. *Analisis Kesenjangan Belanja Modal Dan Belanja Operasional pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi Vol. 7 No. 1*. Dalam <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/kompetitif/article/view/352/254>. Diakses pada 03 Oktober 2024.
- Tumija dan Ghina Sinta. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*.9 (2): 61–78.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.